

GUGATAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES DPR-PEMERINTAH BERI SINYAL SETUJU MK SENTIL HARUSNYA UBAH UU

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terlihat kompak memberi sinyal setuju agar batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) turun dari 40 ke 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Sinyal ini tampak dalam keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/8/2023). Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra pun memeberikan sentilan bila sebenarnya tak perlu ada sidang uji materi terkait UU Pemilu. Bila legislatif dan eksekutif satu suara harusnya langsung saja mengubah UU yang ada. Di sisi lain, isu yang berkembang gugatan ini untuk membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa seorang presiden harus punya etika.

(Baca Hal 11)



1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia;

4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;

6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;

11. Terdaftar sebagai pemilih

12. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

13. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

14. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

15. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

16. Berusia paling rendah 40 tahun;

17. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;



SYARAT MENJADI CAPRES-CAWAPRES
(Pasal 169 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu)



Sapi Australia Dilarang Masuk Indonesia Pemerintah Lirik Impor dari Afsel hingga India

JAKARTA- Pembatasan impor sementara diberlakukan atas impor sapi Australia. Pasalnya, ada temuan sapi dari 4 lokasi peternakan di Australia terinfeksi virus Lumpy Skin Disease (LSD). Hal itu terungkap saat dilakukan pemeriksaan di kapal alias sebelum bongkar muatan jelang masuk pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah pun segera bergerak. Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang mengatakan, Indonesia membuka opsi untuk mengimpor sapi hidup dari negara lain yaitu India, Brazil, hingga Afrika Selatan.

"Ya kita antar negara kan terbuka. Jangan hanya berharap dari Australia saja. Juga kan ada yang dari India, ada Brasil, ada Afrika Selatan (Afsel) yang sedang diupayakan oleh Menkomarves (Luhut), atas koordinasi dengan Badan Karantina," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

Bambang menyebut Indonesia perlu waspada dan memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Apalagi Indonesia disebut sedang menghadapi ancaman krisis iklim. "Kita juga waspada untuk kebutuhan protein hewani. Apalagi di tengah-tengah ancaman krisis iklim, kan begitu ya. Sehingga perlu ada langkah-langkah pemerintah untuk menyikapi, ada alternatifnya," lanjutnya.

Namun, keputusan mengimpor sapi dari negara-negara tersebut tetap memerlukan kajian. Jika hasilnya tidak memungkinkan maka opsi impor tidak akan diambil. Pemerintah, kata Bambang, sangat berhati-hati dan mengikuti regulasi dalam memutuskan hal tersebut.

Sebelumnya, dalam unggahan di Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (12/7/2023), Luhut mengungkapkan kehadirannya ke Afrika Selatan adalah untuk memberikan kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri KTT BRICS. Dalam pertemuan Luhut bilang Indonesia mau mengimpor sapi dan kedelai dari Afrika Selatan.

Dia bilang nantinya Indonesia akan menekan kesepakatan terkait impor sapi dan kedelai dengan Afrika Selatan di KTT BRICS. Rencananya, Indonesia melakukan impor 50.000 ekor sapi dan 300.000 ton kedelai.

"Dalam KTT ini nantinya diharapkan akan terjadi kesepakatan terkait impor sapi dan kedelai yang akan ditandatangani pada saat kunjungan ini. Sebagai langkah awal, kami sedang mengeksplorasi potensi kerja sama impor 50.000 ekor sapi dan 300.000 ton kedelai dari Afrika Selatan," ujar Luhut.

Menurutnya impor ini mutlak



(Ilustrasi) Kapal ternak yang tengah mengangkut puluhan sapi bakalan dari Australia. (dok)

dilakukan mengingat harga daging sapi yang semakin meningkat serta prediksi dari Kementerian Pertanian yang mencatat bahwa Indonesia masih membutuhkan 40% komoditas daging sapi. Selain itu kebutuhan 3 juta ton kedelai di dalam negeri juga harus dipenuhi.

Australia Minta Waktu 60 Hari

Bambang juga mengungkapkan, pihak Australia tengah meminta waktu 60 hari, terhitung sejak 12 Juli 2023 untuk melakukan penyelidikan dan pengujian. Untuk memastikan asal usul terinfeksi sapi-sapi impor yang akan masuk Indonesia itu.

"Kita tunggu 60 hari, sejak 12 Juli. Jadi deadline-nya 12 September nanti. Jika benar sapi-sapi itu terinfeksi dari asal 4 peternakan itu, kita akan tutup impor dari situ, nggak boleh impor lagi. Kita tidak akan melakukan perubahan protokol karantina, karena ini bukan pelanggaran di protokolnya," kata Bambang saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

"Kita tunggu hasil penyelidikan

Australia. Jika positif itu dari sana, maka impor dari 4 farm (peternakan) itu tidak boleh. Juga, impor dari peternakan yang lokasinya dalam radius 60 km. Meski bukan zoonosis (dapat ditularkan ke manusia dan sebaliknya). Tapi penyakit ini bisa menular (antarhewan). Virus ini bisa menular oleh vektor pembawa, seperti nyamuk, lalat, bisa terbang sampai radius 12 km," jelasnya.

Larangan itu akan diberlakukan tanpa menunggu pengujian kembali. Lebih lanjut, jelas Bambang, jika akhirnya dipastikan virus LSD ditularkan dari peternakan di Australia, pemerintah Indonesia juga akan menurunkan petugas medis atau dokter hewan ke Australia untuk menyatakan apakah boleh lanjut impor sapi atau tidaknya.

"Nanti yang perlu diputuskan bahwa ternyata tertular di sana ya wajib kita turunkan dokter petugas kita kesana, untuk menyatakan yang ini boleh, yang ini tidak. Dengan radius yang aman dari penyebaran tadi," ujarnya.

Untuk diketahui, LSD atau cacar sapi/kerbau merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang utamanya menyerang hewan sapi. Penyakit ini dicirikan dengan adanya benjolan pada kulit sapi.

Bambang menjelaskan, temuan virus LSD pada sapi impor asal Australia ini bermula dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Karantina, dan diketahui ada empat farm di Australia yang diyakini menjadi asal virus tersebut.

Untuk membuktikan temuan tersebut, Australia meminta waktu 60 hari sejak tanggal ditemukan adanya virus tersebut, untuk dilakukan pendalaman pengujian. Apabila dinyatakan negatif virus LSD, maka akan terus dilanjutkan impornya, tetapi kalau misalnya dinyatakan positif Indonesia akan menghentikan impor sapi dari farm tersebut.

"Jadi 60 hari sejak tanggal ditemukan kemarin itu, masing-masing kita (Indonesia dan Australia) juga melakukan pendalaman pengujian, dalam waktu 60 hari ini sebenarnya kita tidak menutup impor. Ada 4 farm itu, yang itu kita tutup, dan sampai dengan 60 hari kemudian akan ada jawaban dari Australia. 60 hari sejak 12 Juli surat kita yang pertama memberi tahu itu," jelasnya.

Bambang mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan sebelumnya telah ditemukan sebanyak 13 ekor sapi dari empat farm tersebut yang terjangkit virus LSD. "Ada sekitar 13 ekor dari 4 farm," ungkapnya. "Jadi saat ini sedang dalam pengkajian, penelitian apakah jenis virus penyebab LSD ini sama, apakah memang yang ada di Indonesia dengan yang di Australia itu sama. Ini sedang dalam kajian," pungkas Bambang. (wid,rls,ant/dya)

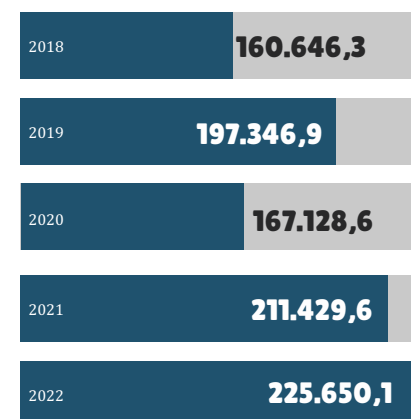
VOLUME IMPOR DAGING SEJENIS LEMBU* INDONESIA BERDASARKAN NEGARA ASAL TAHUN 2022

*sapi, kerbau, dan sejenisnya



VOLUME IMPOR DAGING SEJENIS LEMBU* INDONESIA (2018-2022)

*sapi, kerbau, dan sejenisnya



(Ton)

Revisi UU ASN Diyakini Beri Jaminan 2,3 Juta Honororer



Kegiatan diskusi bertajuk 'Revisi UU ASN dan Nasib Tenaga Honororer' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/8/2023). (dok)

JAKARTA-Pemerintah dan DPR terus menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Beleid teranyar itu diyakini dapat beri kepastian tenaga honororer yang telah membengkak mencapai 2,3 juta orang. Ditargetkan, RUU ASN disahkan November 2023 bebarengan dengan dihapusnya pegawai Non-ASN.

"Bahwa dengan adanya non-ASN 2,3 juta yang akan diakomodir, apakah di ASN PPPK pool time, PPPK paruh waktu (part time) tadi, prinsipnya adalah kesejahteraan tidak berkurang. Kemudian, tidak akan di PHK massal, yang ketiga, anggaran tidak bertambah akibat dari kebijakan ini," kata anggota Komisi II Guspari Gaus dalam diskusi bertajuk 'Revisi UU ASN dan Nasib Tenaga Honororer' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Guspari memahami ada kekhawatiran dengan klusterisasi ASN. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pemerintah sudah memikirkan langkah strategis. "Bahwa orang-orang yang bekerja di 2,3 juta sebagaimana saya sebutkan tadi itu tidak melulu semuanya masuk kepada PPPK part time, tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki," ucap Guspari.

Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menekankan menjawab tuntutan tenaga honororer diperlukan keberanian pemerintah daerah (pemda). Dia mencontohkan soal formasi 1 juta guru honororer menjadi PPPK yang belum kunjung tuntas karena pemda yang mengajukan kuota kebutuhan PPPK.

"Kemendikbud mengatakan perlu tenaga pendidikan 1 juta. Karena hitungannya begitu tapi karena di breakdown ke teman-teman pemda khususnya dan teman-teman Pemda sampai sekarang ada ketidakjelasan," ujar Mardani.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja, berharap revisi UU ASN menjadi kerangka bagi kesejahteraan para ASN. Bakal beleid itu diharapkan juga menjaga profesionalitas para ASN.

"Padahal, itu justru menjadi bagian penting dalam kerangka kesejahteraan ASN kita, mudah-mudahan ini pun jadi substansi di dalam RUU ASN ini, karena itu harapan seluruhnya, termasuk keadilan bagi yang diangkat menjadi PPPK," ucap Aba.

Guru Honororer Tergantung Pemda

Soal pengoptimalan kuota formasi guru honororer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bergantung pada pemerintah daerah (pemda). Kendala di daerah diyakini jadi masalah sedikitnya kuota yang diajukan.

"Daerah-daerah itu kan kadang-kadang juga mengusulkan tidak optimal ya, karena mereka juga maklum mungkin ada keterbatasan anggaran dan sebagainya," kata Aba Subagja.

Aba menuturkan masing-masing pemda memiliki otonomi yang berbeda. Kebutuhan guru juga berbeda di setiap daerah. "Kecuali di sentralistik, jadi Kemendikbud merekrut guru dibagiin kan gitu ya, didistribusi. Tapi kan kewenangannya berbeda termasuk undang-undang

ASN yang menyebut itu ya PPPK-nya guru itu ya di gubernur, bupati, wali kota. Jadi kewenangannya itu ada di pemda masing-masing," jelas Aba.

Dia menegaskan koordinasi KemenPAN-RB bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis khususnya mencapai target pengajuan formasi seleksi 1 juta guru PPPK. Sehingga, pencapaian target itu masih bergantung pemda. "Tahun ini kan 300 ribuan. Karena kan memang dari formasi yang kita siapkan itu hampir 600 ribu, tapi yang usung cuma 300 ribuan. Jadi memang ya kita enggak bisa memaksa pemda juga," jelas Aba.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, jumlah tenaga honororer hampir setiap tahun meningkat pesat. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas juga membeberkan salah satu penyebab jumlah tenaga honororer bertambah setiap tahun.

Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang masuk dan bekerja melalui jalur jalur titipan. Baik orang tua, kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan jumlah pegawai Non ASN di setiap instansi/Lembaga meningkat pesat setiap tahunnya. Namun meski demikian, sehubungan dengan dihapusnya pegawai Non-ASN sebelum bulan November 2023.

Pemerintah berencana menaikkan status honororer supaya bisa diangkat menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap bekerja.

Terdapat kategori tenaga honororer yang diharapkan menjadi prioritas penyelesaian dari pemerintah. Kategori tenaga honororer itu merupakan pegawai Non-ASN yang bekerja di bidang Kesehatan, alias tenaga Kesehatan (nakes).

Hal itu ditegaskan oleh Nihayatul Wafiroh, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB. Menurutnya, terkait rencana pengangkatan pegawai honororer menjadi ASN atau PPPK harus memperioritaskan tenaga kesehatan (nakes).

Harus ada reward yang diberikan pemerintah. Setelah sebelumnya banyak nakes yang meninggal akibat berjuang menyelesaikan permasalahan Covid 19 di Indonesia. "Jadi ini kesempatan buat kita, untuk memberikan reward kepada tenaga Kesehatan kita (honororer). Agar mereka bisa kesejahteraannya lebih terjamin," ujarnya dikutip dari kanal YouTube DPR RI. (wid,rls,kum/dya)

PERKIRAAN NOMINAL GAJI TENAGA HONORER

1. JAWA BARAT

- Satpam: **Rp3.777.000**

- Pengemudi: **Rp3.777.000**

- Petugas kebersihan: **Rp3.433.000**

- Pramubakti: **Rp3.433.000**

2. JAWA TENGAH

- Satpam: **Rp2.280.000**

- Pengemudi: **Rp2.280.000**

- Petugas kebersihan: **Rp2.0723.000**

- Pramubakti: **Rp2.0723.000**

3. JAWA TIMUR

- Satpam: **Rp4.135.000**

- Pengemudi: **Rp4.135.000**

- Petugas kebersihan: **Rp3.759.000**

- Pramubakti: **Rp3.759.000**

BEBERAPA POIN RANCANGAN REVISI UU ASN

Pasal 131 dan 132 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.

(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Baca Juga: Kabar Terbaru Pendaftaran CPNS 2023 & PPPK dari KemenPAN-RB, Kuota Lumayan

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidakdediaan untuk diangkat sebagai PNS Pada pembahasan di tingkat Panja, usulan DPR itu ditolak pemerintah dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu, seperti petugas kebersihan, diangkat menjadi PPPK Part Time atau PPPK Paruh Waktu.

Rocky Gerung dan Refly Harun Dipolisikan, Dua Saksi Diperiksa

JAKARTA - Relawan Indonesia Bersatu melaporkan pengamat politik Rocky Gerung dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (31/7/2023) kemarin, tercatat dengan Nomor: LP/B/4450/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023.

"Alhamdulillah Laporan kami diterima. Hari ini melaporkan resmi Rocky Gerung sama Refly Harun," kata Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan di Polda Metro Jaya, Senin (31/7/2023) malam.

Dikutip dari tempo.co, Lisman mengatakan seluruh relawan Joko Widodo (Jokowi) murka mendengar pernyataan Rocky Gerung. Ia menilai jika diksi yang dibangun Rocky Gerung pada saat berbicara di suatu forum sangat tidak etis karena menyerang kepala negara dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Parahnya lagi, video rekaman turut diunggah oleh Refly Harun di saluran youtube miliknya.

"Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah munculkan kegaduhan makanya kami melaporkan ke Polda Metro Jaya," ujar dia.

Lisman mengungkap, dalam laporannya ia turut menyeret nama Refly Harun sebagai pemilik akun. Menurut dia, akibat rekaman video yang disebarkan memunculkan kegaduhan

"Dia (Refly Harun) yang punya saluran youtube dan memasukan video ke saluran youtube dan tersebar ke seluruh Indonesia. Yang tonton hampir puluhan ribu. Saat ini masih aktif," ujar dia.

"Jadi dua terlapor Refly sebagai penyebar sedangkan Rocky Gerung adalah pelaku yang menghina Presiden Jokowi," sambung dia.

Tak hanya itu saja, Lisman juga mengaku dalam laporannya turut menyerahkan sejumlah barang bukti diantaranya 1 flash disk berisi dua video dan pernyataan Rocky Gerung yang tersebar ada di media. "Saya bawa lengkap barang buktinya dan sudah dilampirkan. Makanya bisa muncul laporan polisi," ucap dia.

Ia mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bersikap tegas dalam menanggapi kasus ini. Kalau perlu, kata dia segera menangkap Rocky Gerung. "Kapolda Metro sikapi tegas kalau perlu Rocky Gerung segera ditangkap," ujar dia.

Dalam laporan ini, kedua terlapor disangkakan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sementara dilansir dari Tribunnews.com, Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pihaknya akan gerak cepat mengusut kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya

Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polda Metro Jaya telah menerima pelaporan terkait Rocky Gerung dan Refly Harun yang diduga menghina Jokowi.

"Telah diterima laporannya di SPKT Polda Metro Jaya. Pada materi laporannya ada dua terlapor atas nama RG dan RH," kata Kombes Trunoyudo, Selasa (1/8/2023).

Lantas pihaknya mengatakan Polda Metro Jaya telah memeriksa pelapor dan dua saksi. Sebelumnya, kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi) juga melaporkan Rocky Gerung atas dugaan menghina Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri. Namun, laporan itu ditolak.

Alasan Bareskrim menolak laporan tersebut karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan. "Dan mereka merasa tidak mungkin memanggil Presiden," kata Sekretaris Jenderal Bara JP, Relly Reagen kepada wartawan, Senin (31/7/2023) malam.

Relly mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Bareskrim. Namun setelah 9 jam berkonsultasi, kata Relly, SPKT Bareskrim menolak laporan dan mengalihkannya ke pengadilan masyarakat.

Relly mengatakan pengadilan masyarakat ini masih ada kemungkinan naik menjadi laporan polisi apabila penyidik telah menyambangi Presiden Jokowi dan mengklarifikasi pengadilan relawan. "Bukti videonya udah kami serahkan, kami sertakan yaitu kanal YouTube Refly Harun," kata dia.

Pakar Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih dalam level standar sebagai oposisi. Dalam pernyataannya yang viral, Rocky menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden dan dia juga melontarkan kata kasar.

"Saya sebut standar karena itu hal umum di negara yang memilih sistem demokrasi. Apalagi Indonesia di era saat ini memilih jalan demokrasi liberal (bukan demokrasi Pancasila). Ini terlihat dari cara-cara Presiden mengelola negara sangat liberal, saking liberalnya sampai mengarah kepada new-

Menurut Ubedilah, negara yang sifatnya demokrasi liberal, siapapun presidennya, harus siap dikritik oleh oposisi dengan beragam narasi yang



Refly Harun dan Rocky Gerung

mungkin bernada hinaan. Kalau tidak siap dikritik dengan keras, kata Ubedilah, maka jangan pernah mau jadi presiden di negara liberal seperti Indonesia.

"Apa yang disampaikan Rocky Gerung harus ditonton dan dibaca dalam satu rangkaian narasi yang utuh dan panjang, jangan sepotong-sepotong hanya di bagian kata bajingan, tolol atau pengecut," ujar Ubedilah.

Lebih lanjut, ia menyebut masyarakat harus melihat argumen dan konteks atau bahkan makna konotatif pernyataan Rocky Gerung secara semiotik. Dengan demikian, Ubedilah berpendapat masyarakat bakal menemukan argumen dan konteksnya.

Ia berpendapat argumen, konteks dan makna semiotik dari pernyataan Rocky tidak masalah karena posisinya secara politik adalah oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi

"Jadi sebagai oposisi ia berhak melakukan kritik dengan bahasa sesuai standarnya Rocky Gerung yang tentu ia memiliki argumen, konteks dan makna semiotiknya tersendiri secara konotatif, tidak dimaknai begitu saja secara denotatif," kata Ubedilah.

Menurut Ubedilah, cara Rocky Gerung menjadi oposisi terbilang unik. Sebab di saat yang bersamaan, Rocky juga berselancar dengan jejaring penguasa. Misalnya, kata dia, pernah terlihat dekat dengan Mahfud Md dalam satu frame podcast, menerima Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi di rumahnya, hingga menghadiri undangan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai pembicara di peluncuran buku LBP.

Soal pernyataan Rocky yang dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Bareskrim Polri sebagai penghinaan terhadap Presiden, Ubedilah mengatakan hal itu merupakan cara yang reaktif dan cenderung represif serta tidak intelektual. Apalagi, relawan dalam konteks pelaporan tersebut bukan sebagai korban dari

apa yang mereka sebut sebagai penghinaan.

"Mereka semacam tidak memiliki legal standing (posisi hukum) sebagai korban. Jika Jokowi yang melaporkan langsung memungkinkan akan direspon Bareskrim karena Jokowi sebagai korban dan proses hukum akan berjalan," kata Ubedilah.

Jika persoalan ini dibawa ke ranah pengadilan, Ubedilah berpendapat hal itu akan membuat situasi semakin memanas. Sebab, di pengadilan nanti Rocky akan membuktikan pernyataannya tentang bajingan, tolol dan pengecutialian.

"Borok-borok kekuasaan akan diumbar di meja pengadilan dan situasi politik mungkin akan memanas. Sampai disitu saya tidak percaya Jokowi akan berani hadapi situasi itu," kata Ubedilah.

Sebelumnya, dalam rekaman video viral, memperlihatkan Rocky Gerung melontarkan perkataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Dalam rekaman itu, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden. Rocky juga melontarkan kata kasar.

"Kalau gak jadi presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa, tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk tawarkan IKN, dia mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya," kata Rocky.

"Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, gak pikirkan nasib kita," lanjut Rocky dalam video tersebut.

Imbas dari pernyataan tersebut, sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terdiri dari Barikade 98, Foreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP, mendatangi Bareskrim pada Senin untuk membuat laporan polisi. Akan tetapi Bareskrim menolak laporan terhadap Rocky Gerung tersebut. (lut/dya)

Panji Gumilang Jadi Tersangka Penistaan Agama, Terancam 10 Tahun Penjara

DIREKTORAT Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, Selasa (1/8/2023). Atas sangkaan pasal berlapis tersebut, Panji Gumilang terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik belum memastikan apakah Panji akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan atau tidak. Penetapan Panji sebagai tersangka itu diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani. Dia menyatakan penetapan tersebut dilakukan setelah dilakukan gelar perkara.

"Setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, dihadiri penyidik, Propam, Irwasum, Ditkum dan Wasidik, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk mengaitkan saudara PG sebagai tersangka," kata Djuhandhani di Mabes Polri dikutip dari tempo.co.

"Jadi untuk menempatkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan tiga alat bukti tambah satu surat," kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

Djuhandhani menyebut, alat bukti itu terdiri dari alat bukti elektronik, keterangan saksi, maupun ahli. Sementara itu, surat yang dimaksudkan di antaranya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, ia tak menjelaskan rinci isi dari Fatwa MUI itu. "Fatwa MUI kita jadikan alat bukti surat yang berisi petunjuk," ujar dia.

Menurut Djuhandhani, penyidik juga sudah memeriksa setidaknya 40 saksi dan 17 ahli dalam perkara ini. "Sampe dengan saat ini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli," kata Djuhandhani.

Sebelumnya, Panji Gumilang diperiksa oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri selama kurang lebih 4 jam. "Yang bersangkutan mulai diperiksa pukul 15.00 dan selesai pukul 19.00," kata Djuhandhani.

Djuhandhani mengatakan, setelah ditetapkan tersangka, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Panji Gumilang. "Pada pukul 21.15 penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan," kata Djuhandhani.

Meskipun demikian, Djuhandhani menyatakan pihaknya belum menentukan apakah akan melakukan penahanan atau tidak terhadap Panji. "Kami masih memiliki waktu 1x24 jam untuk dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan," kata Djuhandhani.

Atas perbuatannya, Panji



Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang memenuhi panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. (jawapos/Dery Ridwansah)

Gumilang dijerat Pasal 156a KUHP dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dari persangkaan pasal berlapis tersebut, Panji Gumilang terancam dipidana hingga 10 tahun. "Pasal 14 ancamannya hukuman 10 tahun, Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE ancaman 6 tahun dan Pasal 156a KUHP ancaman 5 tahun," kata Djuhandhani.

Kasus ini bermula dari beredar kabar sejumlah kontroversi di media sosial yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Sejumlah pihak melaporkan Panji ke Bareskrim pada bulan Juni 2023. Polri Beberapa di antara ajaran Panji yang dinilai menyimpang terkait ajaran memperbolehkan perempuan menjadi khatib.

Dalam unggahan media sosial yang beredar, Panji juga mempersilakan perempuan berjejer satu saf dengan laki-laki saat shalat. Bahkan, pelapor juga menyorot pernyataan Panji soal yang menyangkal bahwa Al Quran bukan firman Tuhan sebagai penistaan

Selain kasus penistaan agama, penyidik Bareskrim saat ini juga tengah melakukan penyelidikan dalam sejumlah kasus lainnya terhadap Panji. Diantaranya adalah soal penyelesaian dana zakat, korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima Pondok Pesantren Al Zaytun hingga pencucian uang.

Penyelidikan ini dilakukan Bareskrim setelah Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan laporan hasil analisa (LHA) terhadap Panji Gumilang. Dalam laporannya, PPATK menyatakan bahwa Panji terdeteksi memiliki ratusan rekening atas namanya pribadi dan atas nama sejumlah orang lainnya. Total nilai transaksi dalam rekening itu disebut mencapai Rp 15 triliun. Transaksi

tersebut dilakukan Panji sejak 2007 hingga 2023.

Sementara dilansir dari kompas.com, sejumlah simpatisan dari pemimpin Ponpes Al Zaytun memadati pintu masuk Mabes Polri. Setidaknya terdapat sekitar 20 orang yang berdiri di sekitar gerbang dan pintu masuk pejalan kaki Bareskrim Mabes Polri.

Sejumlah personel Polri pun tampak berjaga di depan pintu masuk. Mayoritas dari para simpatisan Panji yang datang ke depan Mabes Polri adalah pria. Bahkan, salah satu anggota tim pengacara Panji, M Ali Syaifudin, mengaku tidak masuk ke dalam Bareskrim untuk mendampingi Panji. "Oh iya (dibatasi masuk). Cukup perwakilan saja," ucap Ali.

Sementara itu, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan pencabutan gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Hakim mengatakan sebelum sidang hari ini, Panji lewat kuasa hukum telah mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan dan terdaftar pada 20 Juli lalu. Surat itu diterima hakim pada 21 Juli.

"Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara," kata hakim ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Panji sebelumnya menggugat Mahfud secara perdata ke PN Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Panji menggugat sebesar Rp5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dianggap berisik fitnah.

Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo menjelaskan gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Saat itu, Mahfud MD merespons santai soal gugatan yang dilayangkan

Panji Gumilang, terhadap dirinya ke PN Jakarta Pusat. Ia juga mengaku tidak akan terkecoh dengan gugatan yang dinilai untuk mengalihkan perhatian dari dugaan tindak pidana yang mungkin menjerat Panji Gumilang.

Pengacara pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang, Hendra Effendi mengungkap alasan kliennya mencabut gugatan senilai Rp5 triliun terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, Panji merasa pernyataan Mahfud terkait Al-Zaytun belakangan ini sudah membaik.

"Klien kami ini menilai perkembangan demi perkembangan, hari demi hari, bahwa melihat dari sikap tergugat, Prof Mahfud ini memberikan statement-statement yang baik, yang menyampaikan bahwa Ponpes Al-Zaytun ini ponpes yang bagus, yang baik, anak-anaknya sehat-sehat semuanya, pintar-pintar, lain-lain, tentunya ini direspons sangat antusias oleh klien kami," kata Hendra di PN Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Hendra juga menduga sudah ada komunikasi antara Panji dan Mahfud terkait gugatan tersebut. Namun, ia mengaku tidak mau masuk terlalu jauh mengenai hal itu. "Barangkali ada juga komunikasi yang kami tidak paham, kami tidak mau lebih intervensi jauh terhadap hal ini, kita hormati kalau memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang ke arah yang lebih baik," katanya. (lut/dya)



Setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, dihadiri penyidik, Propam, Irwasum, Ditkum dan Wasidik, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk mengaitkan saudara PG sebagai tersangka,"

**BRIGJEN
DJUHANDHANI**
Direktur Tindak Pidana Umum
Bareskrim Polri



A portrait of a young man with dark hair, wearing a dark blue jacket over a light blue hoodie. He is smiling slightly and looking towards the camera. The background is a blurred outdoor setting with tree branches.

TIKO ARYAWARDHANA

Pria yang Dekat dengan BCL

Foto-foto : Berbagai Sumber

TIKO Aryawrdhana sosok yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, diduga sebagai kekasih baru penyanyi terkenal Bunga Citra :estari atau BCL.

Sejumlah rumor dan spekulasi muncul terkait kedekatan keduanya, terutama setelah mereka terlihat bersama dalam perayaan ulang tahun BCL yang baru-baru ini berlangsung.

Tiko Aryawardhana merupakan seorang profesional di bidang perbankan dan telah menyelesaikan pendidikan Ekonomi dari Universitas Trisakti.

Pria beragama Islam ini diketahui memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya. Lewat akun Instagram-nya dengan nama @tikotiki, Tiko sering berbagi minatnya dalam musik dan olahraga.

Meskipun banyak spekulasi tentang hubungan mereka, baik Tiko Aryawardhana maupun BCL belum secara publik mengkonfirmasi status hubungan mereka.

Namun, kehadiran Tiko dalam perayaan ulang tahun BCL telah memancing beragam tanggapan dan harapan baik dari para netizen.

Sebelumnya, BCL telah dikenal sebagai seorang ibu tunggal setelah kepergian suaminya, Ashraf Sinclair, pada Februari 2020.

Meski pernah dikabarkan memiliki kedekatan dengan Ariel Noah,

perhatian publik saat ini lebih tertuju pada Tiko Aryawardhana sebagai sosok ayah baru potensial bagi putra BCL, Noah Sinclair, sejak November 2022.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang agama Tiko Aryawardhana, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa ia memiliki akun Instagram dengan pengaturan privat, dan akun tersebut diikuti oleh BCL dan beberapa penyanyi lainnya.

Profil dan latar belakang Tiko Aryawardhana menjadi perhatian banyak orang, terutama penggemar BCL, setelah munculnya banyak rumor dan spekulasi tentang kedekatan mereka. Namun, baik Tiko maupun BCL tampaknya masih memilih untuk menjaga hubungan mereka dengan penuh privasi.

Profil

Pekerjaan Tiko bertolak belakang dengan profesi BCL sebagai artis dan selebriti.

Melalui laman LinkedIn miliknya, Tiko Aryawardhana bekerja di wealth management sebagai ahli pemasaran dan penjualan produk sebuah bank.

Selain memiliki pekerjaan tetap di bank terkemuka, kabarnya Tiko juga disebut-sebut membangun bisnis di bidang musik.

Sayanginya, karena bukan berasal



Kehadiran Tiko Aryawardhana (baji hitam belakang BCL), saat ulang tahun sang ibu BCL

dari kalangan selebriti, tak banyak informasi pribadi tentang Tiko Aryawardhana yang beredar.

Tiko Aryawardhana merupakan sosok yang menyukai musik dan olahraga.

Hal ini diketahui melalui bio yang ditulis Tiko melalui akun Instagramnya, @tikotiki.

Salah satu jenis olahraga yang diminati oleh Tiko adalah bersepeda. (Berbagi Sumber)



PROFIL

Nama:
Tiko Aryawardhana

Usia:
43 tahun

Pekerjaan:
Pegawai Bank

Hobi:
Musik, Travelling

Instagram:
@tikotiki

BCL dan Tiko Aryawardhana pakai Baju Couple Bareng

MANFAAT MINUM AIR KELAPA UNTUK KESEHATAN

MINUMAN berbahan air kelapa sangat banyak ditemukan di pasaran. Air kelapa segar juga mudah ditemukan di Indonesia yang merupakan negara tropis.

Air kelapa terkenal akan kesegarannya. Selain itu, air kelapa juga bisa menjadi obat penyakit.

Dilansir dari Prevention, ahli gizi di Optivia Jennifer Christman mengatakan untuk memilih minuman berbahan air kelapa yang 100 persen asli.

Hindari minuman air kelapa yang mengandung bahan tambahan, seperti gula atau pengawet. Minum air kelapa langsung dari buah kelapa itu lebih baik.

Air kelapa kaya akan karbohidrat dan elektrolit, seperti kalium, natrium, dan magnesium. Air kelapa juga sering digunakan masyarakat saat keracunan.

Lebih lengkapnya, berikut adalah manfaat-manfaat air kelapa bagi kesehatan.

1. Kaya akan nutrisi

Seperti yang dikatakan sebelumnya, air kelapa kaya akan nutrisi, terutama nutrisi utama, seperti potasium, sodium, magnesium, dan kalsium.

Ahli diet mengatakan jika diet Anda kekurangan salah satu nutrisi ini, air kelapa mungkin bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan harian.

2. Sumber elektrolit alami

Menurut National Library of Medicine, elektrolit adalah mineral yang tidak ditemukan dalam air yang membantu menjaga berbagai fungsi tubuh yang penting termasuk hidrasi, fungsi otot, dan pH darah yang seimbang. Saat berkeringat, Anda kehilangan elektrolit.

Meskipun minuman olahraga dapat membantu memulihkannya setelah berolahraga dengan baik, minuman

tersebut biasanya disertai dengan tambahan gula yang tidak perlu. Air kelapa murni tidak memiliki gula tambahan itu.

Satu cangkir air kelapa mengandung lebih dari dua kali lipat jumlah elektrolit dari minuman olahraga.

3. Tinggi potasium

Asupan potasium yang tidak mencukupi dapat meningkatkan tekanan darah, menguras kalsium dalam tulang, dan meningkatkan risiko batu ginjal.

Secangkir air kelapa memberikan 500 mg nutrisi potasium, maka ini akan bermanfaat bagi tubuh yang kekurangan potasium. Kurangi minum air kelapa jika Anda memiliki kadar kalium yang tinggi dalam darah.

4. Mendukung kesehatan jantung

Mendapatkan lebih banyak potasium melalui air kelapa dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung Anda. Ahli diet Sarah Olszewski mengatakan bahwa potasium dapat membantu mengendurkan pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah yang sehat dan mengatur tingkat tekanan darah.

5. Rendah kalori

Air kelapa adalah minuman yang

baik untuk menurunkan berat badan karena lebih rendah kalori daripada minuman alternatif, seperti jus dan soda. Namun, air kelapa tidak akan pernah sebaik menurunkan berat badan seperti air biasa yang bebas kalori. Mengganti minuman berkalori tinggi dengan air kelapa murni bisa menjadi pilihan yang lebih sehat bagi orang yang ingin mengatur berat badannya.

6. Sangat menghidrasi

Minum cukup air setiap hari adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk kesehatan. Air kelapa dapat membantu orang memenuhi kebutuhan hidrasi karena mengandung sekitar 95% air.

7. Antioksidan kuat

Air kelapa mengandung antioksidan yang dapat membantu menetralkan radikal bebas berbahaya dalam tubuh dan melindungi sel dari stres oksidatif. Studi berbasis hewan telah mengeksplorasi teori ini dengan hasil yang positif, tetapi lebih banyak penelitian diperlukan pada manusia untuk menentukan seberapa kuat efek pencegahannya sebenarnya.

Air kelapa aman diminum oleh semua orang dari anak-anak hingga orang dewasa. Walaupun memiliki banyak manfaat, Anda perlu memperhatikan beberapa hal dalam mengonsumsinya.

Dilansir dari WebMD, air kelapa dapat mengganggu tekanan darah dan kontrol gula darah selama dan setelah operasi. Oleh karena itu, Anda perlu menghentikan penggunaan air kelapa setidaknya dua minggu sebelum jadwal operasi.

Anda juga perlu memperhatikan konsumsi air kelapa yang dikombinasikan dengan obat-obatan. Mengambil air kelapa bersamaan dengan obat yang menurunkan tekanan darah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi terlalu rendah. (bisnis)



TAMPILAN

TABLET GALAXY TAB 9

SAMSUNG baru saja meluncurkan tablet kelas premium teranyarnya Galaxy S9 series ke pasaran termasuk di Indonesia.

Tablet ini hadir dengan tiga varian yaitu Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, dan Galaxy Tab S9 Ultra.

Seri baru ini membawa keunggulan sebagai tablet pertama di lini premium yang memiliki sertifikasi IP68 atau tahan air.

Dari segi tampilan Galaxy Tab S9 memiliki ukuran yang paling ringkas di antara tiga pilihan tablet yang ada dengan ukuran 11 inci.

Ukuran ini terasa paling pas bagi pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi dengan kebutuhan perangkat layar lebar disertai beragam kemampuan.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Annisa Maulina mengungkapkan pada lini layar Samsung sengaja membawa spesifikasi Dynamic AMOLED 2x mengikuti kebutuhan konsumennya.

Samsung juga kembali menghadirkan kecanggihan layar berupa "Vision Booster" yang sebenarnya sudah dikenalkan lewat ponsel pintar Samsung Galaxy S22 series.

Teknologi ini memungkinkan penyesuaian kecerahan layar baik di dalam ruangan maupun luar ruangan sehingga pengguna lebih mudah mengakses tabletnya di mana saja dan kapan saja.

Dengan kecepatan refresh rate 120 Hz, saat menggulirkan layar memang pengalaman yang diberikan lebih mulus di Galaxy Tab S9 ini.

Tak lengkap rasanya apabila membahas tablet Samsung tanpa SPen, di Samsung Galaxy Tab S9 series ini SPen yang dihadirkan pun membawa sertifikasi tahan air yang serupa dengan Ip68.

Dengan Snapdragon 8 Gen 2 sebagai dapur pacunya, kinerja imersif

dari layar dan SPen yang responsif terasa sangat menyenangkan di Galaxy Tab S9.

Untuk membuat grafis dan gambar pengguna juga bisa dengan lincah menuangkan kreativitasnya di tablet ini.

Jika ingin menambah hasil jepretan secara langsung dalam pembuatan grafis, pengguna bisa dengan mudah memanfaatkan hasil tangkapan kameranya tanpa perlu mengedit foto susah payah.

Tinggal memilih objek foto yang

diinginkan dan tekan lama dengan SPen. Voila! dengan mudah foto yang terpilih bisa disalin dan ditempel ke grafis yang sedang dibuat.

Membahas sisi kamera, di Galaxy Tab S9 hanya terdapat satu kamera utama berukuran 13 MP dan kamera selfie 12 MP. Namun, keduanya terasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Pada sisi daya tablet, dengan baterai 8400 mAh dan dukungan pengisian daya 45W rasanya juga sudah tepat untuk pengguna bisa memenuhi seluruh kebutuhan baik dari segi produktivitas dan hiburan dalam waktu sehari-hari.

Bagi yang mencari perangkat fungsional, ringan, dan serba bisa dibanding membeli laptop rasanya memiliki Galaxy Tab S9 sudah lebih dari cukup.

Ketersediaan dan harga Perbandingan dari masing-masing Galaxy Tab S9 (atas), Galaxy Tab S9+ (bawah), dan Galaxy Tab 9 Ultra. (kanan)

Bagi masyarakat Indonesia yang tertarik membeli Galaxy Tab S9, perangkat ini tersedia dalam dua warna yaitu Graphite dan Beige.

Tersedia juga dua pilihan konfigurasi RAM dan ROM yaitu 8GB/128 GB serta 12 GB/256 GB.

Galaxy Tab S9+ tersedia dengan harga Rp16.999.000 untuk 12GB/256GB dan Rp18.999.000 untuk varian 12GB/512 GB.

Sementara Galaxy Tab S9 Ultra tersedia pada harga Rp19.999.000 untuk varian 12 GB / 256 GB dan Rp21.999.000 untuk varian 12GB/512 GB (Ant)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



KIAT AJARI ANAK MEMANDANG KEBERHASILAN

PSIKOLOG klinis yang tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis Ratih Ibrahim, M.M., Psikolog memberikan kiat agar anak memiliki growth mindset yakni pola pikir memandang keberhasilan atau kesuksesan sebagai hasil dari usaha, dedikasi, dan ketekunan yang berkelanjutan.

Cara ini kata psikolog lulusan Universitas Indonesia itu, bisa dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya membangun.

"Alih-alih berkata 'bisa enggak', bisa diganti dengan kata 'belum bisa',

'nanti sebentar lagi bisa,'" kata Ratih dalam diskusi pola asuh anak di Jakarta.

Cara berikutnya yakni memberi ruang untuk anak menyelesaikan masalah. Anak sebaiknya jangan dibuat takut tetapi dibantu agar berbesar hati dan mau berusaha menemukan solusi yang kreatif.

Orangtua, imbuh Ratih, perlu juga memiliki growth mindset misalnya dengan mendorong anak agar tidak menyerah. Mereka boleh-boleh saja mendukung anak namun tetap memberi ruang pada mereka untuk mencoba memikirkan alternatif solusi.

Berikutnya, orangtua perlu menjadi contoh atau teladan yang mempunyai sifat empati.

"Sebagai role model utama anak, orangtua perlu mencontohkan perilaku yang mencerminkan growth mindset dalam hidup keseharian, juga terus mendukung dan menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, agar anak tumbuh optimal," kata dia.

Growth mindset dikatakan menjadi landasan anak agar dapat menguasai delapan winning skills yang dirumuskan bersama para ahli di bidangnya yaitu tim ahli psikolog anak personal growth serta

dokter-dokter anak.

Kedelapan winning skills ini meliputi perhatian, fokus, daya ingat, kemampuan berbahasa, kemampuan psikomotor, logika, penalaran, dan membuat keputusan.

Menurut Ratih, anak dengan growth mindset akan memungkinkannya untuk memaksimalkan potensi, mengatasi ketakutan dan kegagalan, memperkuat ketahanan mental, ingin terus belajar, dan meningkatkan kepercayaan diri. Dia menambahkan, orangtua memegang peran penting dalam mengembangkan pola pikir dan menumbuhkan growth mindset pada anak.

Selain memberikan kiat mengajarkan anak memiliki growth mindset, Ratih juga membagikan satu cara menghadapi anak tantrum atau ekspresi frustrasi anak karena ketidakmampuan mereka mengomunikasikan pikiran dan perasaannya, yakni dengan mengajak anak membuat adonan roti.

"Saya ajak yuk bikin adonan roti.

Roti kan semakin dibanting semakin pulen. Tonjok saja adonannya, habis itu lega. Sekarang bikin roti untuk pizza, nah itu senang dia (anak) lihat hasilnya," ujar dia.

Pendiri perusahaan konseling Personal Growth itu mengatakan, cara ini pernah dia praktekan langsung pada buah hatinya di masa lalu.

Kala menghadapi anak khususnya pada usia sudah dapat diajak berbincang yang marah atau kesal, orangtua juga bisa meminta anak mengutarakannya.

"Nanti kalau kesal bilang sama mama, nanti kita bisa melakukan sesuatu untuk kamu jadi anak yang asik'. Ini adalah tips yang secara langsung pernah saya lakukan buat anak-anak," kata Ratih.

Berdasarkan literatur, tantrum biasanya terjadi pada usia pra sekolah yakni 1 - 4 tahun berupa anak mengekspresikan kemarahan seperti dengan berteriak, memukul, menendang, menangis dan berguling-guling.

Kondisi ini, selain merupakan ekspresi frustrasi anak karena ketidakmampuan mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya, bisa juga karena merasa orangtua tidak peduli dengan kebutuhan mereka dan tidak mau mendengarkan dan tidak memahami keinginan mereka (Ant)



Sebagai role model utama anak, orangtua perlu mencontohkan perilaku yang mencerminkan growth mindset dalam hidup keseharian, juga terus mendukung dan menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, agar anak tumbuh optimal,"

RATIH IBRAHIM, M.M

Psikolog klinis yang tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis



Gugatan Batas Usia (dari hal 1)

SIDANG uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum digelar, Selasa (1/8/2023). Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyentil DPR dan pemerintah yang seakan setuju dengan gugatan perubahan batas minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi minimal 35 tahun.

Saldi kemudian menyindir dua pihak tersebut. Menurutnya, klaim DPR dan pemerintah yang mengaku menyerahkan keputusan uji materiil kepada mahkamah terkesan setuju dengan perubahan tersebut. Menurutnya, tak perlu ada sidang uji materi terkait UU Pemilu jika DPR dan pemerintah setuju batas minimal usia capres dan cawapres 35 tahun. Ia menyebut pembentukan dan perubahan UU adalah kewenangan DPR dan pemerintah.

"Kalau dibaca implisit, walaupun menyerahkan pada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, ini kan bersayap, dua-duanya mau," kata Saldi. "Kalau DPR dan pemerintah setuju mengapa tidak diubah saja UU, tidak perlu melempar isu ini ke MK untuk diselesaikan. Kelihatan pemerintah juga setuju, diubah aja di DPR," lanjutnya.

Saldi pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada DPR dan pemerintah terkait urgensi mengapa batas minimum jabatan itu harus diubah. Meski keduanya memberi sinyal setuju, tapi Saldi melihat ada alasan yang berbeda dari DPR maupun pemerintah.

"Tadi di keterangan baik pemerintah dan DPR itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, tapi itu sama sekali tidak dieksplicitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum," ujarnya.

Dalam sidang tersebut DPR diwakili oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dan pemerintah diwakili oleh Staf ahli Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong. Habiburokhman saat memberikan keterangan dari DPR memaparkan terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara.

Dia menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), Indonesia memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara 2020-2030. Dia berkata penduduk usia produktif yang lebih banyak itu akan berperan besar dalam pembangunan negara, termasuk dengan menjabat sebagai presiden atau wakil presiden.

"Sebab itu penduduk usia produktif dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres," katanya.

Habiburokhman juga membeberkan banyak negara yang juga menerapkan batas usia minimal capres dan cawapres 35 tahun. "Mengacu pada aturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur syarat usia minimal pencalonan capres cawapres 45 negara di dunia memberikan syarat minimal 35 tahun," ujarnya.

Sementara itu, sinyal serupa juga diberikan oleh pemerintah. Togap sebagai perwakilan pemerintah menyampaikan jika berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, setiap warga negara (WN) berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Mengandung makna bahwa siapapun WN memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memerhatikan penalaran logis atas kemampuan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan," kata Togap.

Lebih lanjut, Togap mengatakan UUD 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk jabatan pemerintahan.

"Mungkin saja batas usia bagi keikutsertaan WN dalam jabatan/aktivitas pemerintahan diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk UU sesuai kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya kewenangan pembentuk UU yang tidak dilarang," ujarnya.

Gugatan 3 Pihak

Sebelumnya, gugatan terkait batas minimal capres dan cawapres dilayangkan oleh tiga pihak. Gugatan pertama diajukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. Gugatan kedua

diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sebagai pemohon dan Desmihardi dan M. Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum.

Gugatan ketiga dilayangkan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman. Pengajuan uji materiil ini dianggap upaya memuluskan langkah Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengajak masyarakat untuk melawan gugatan tersebut. Ia menilai gugatan itu sangat salah secara konstitusi. Denny menilai MK akan menabrak norma dan etika konstitusional jika memutuskan batas minimal umur capres-cawapres turun menjadi 35 tahun. Sebab, aturan minimal umur capres-cawapres itu adalah open legal policy.

Tanggapan Partai Politik

Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah syarat batas usia capres-cawapres yang saat ini dalam proses gugatan.

Jazilul berpandangan bahwa syarat batas usia capres cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang.

"Pandangan kami itu bukan wewenang MK. Saat itu wilayahnya DPR untuk memutuskan berdasarkan UU soal usia itu," ucap Jazilul di kantor pusat DPP PKB, Selasa (1/8/2023).

Namun, Wakil Ketua MPR itu mengaku tetap menghormati MK yang saat ini tengah menguji proses gugatan aturan tersebut. Jazilul mengatakan pihaknya tak bisa mengintervensi kewenangan MK. "Enggak, kita nggak bisa mempengaruhi putusan MK, yang jelas UU yang ada sudah baik," ucap dia.

Jazilul meyakini konstelasi politik di Pilpres 2024 akan berubah jika MK mengabulkan gugatan tersebut. Dia menilai bakal ada beberapa nama baru yang lebih muda akan masuk dalam bursa capres dan cawapres. Jazilul menegaskan PKB akan tetap fokus pada proses pencalonan Prabowo

Subianto dan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai capres dan cawapres.

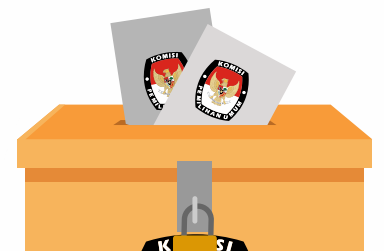
Jazilul mengaku belum membuka opsi lain untuk pasangan capres dan cawapres di luar dua nama itu. "Kita fokus untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Jadi udah itu aja fokusnya," kata dia.

Sementara Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi kans putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres. Gibran baru bisa menjadi cawapres jika gugatan soal batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun diubah menjadi 35 tahun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau pandangan saya, presiden atau pemimpin itu not dealing with the law, but dealing with ethics. Dia tidak ukurannya tidak dengan hukum saja, beyond the law, ada etika," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Selasa (1/8/2023).

Ia pun memberikan contoh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang ia nilai mengutamakan etika sebelum bertindak. Mardani juga mengutip ucapan istri Obama, Michelle, yang mengaku memiliki standar moral tinggi. "Saya suka, kagum, kalau melihat Michelle Obama sama Barack Obama. Orang Amerika lagi. Kata Michelle Obama, 'Standar moral kami tuh tinggi karena orang merujuk kami. Kami enggak boleh melakukan yang orang-orang umum lakukan'. Buat saya itu bagus sekali. Semestinya pemimpin kita meneladani," ucap Mardani.

Mardani menuturkan, sebenarnya Jokowi punya hak politik untuk mengizinkan anaknya maju di pilpres. Namun ia tetap mengingatkan bahwa seorang presiden harus punya etika. "Ya sebetulnya kalau Jokowi punya, itu keinginan personal. Bisa diobjektifikasi oleh masyarakat. Masyarakat bisa menolak, [dengan cara] jangan milih. Nah nanti ada gerakan sipil bisa melakukan itu, tesa-antitesa akan menjadi sintesa," tutup Mardani. (wid,rls,ist,ant/dya)



SYARAT TERKAIT PRESIDENTIAL THRESHOLD DARI MASA KE MASA

Tahun Pemilu	2004	2009	2014	2019
Landasan Hukum	UU 23/2003	UU 42/2008	UU 42/2008	UU 7/2017
Syarat Pencalonan	15 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional (Pasal 5 Ayat 4)	Syarat pencalonan 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional dari pemilu sebelumnya (Pasal 9)	Syarat pencalonan 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional dari pemilu sebelumnya (Pasal 9)	20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional dari pemilu sebelumnya (Pasal 222)
Pemenang	SBY-Jusuf Kalla	SBY-Boedione	Jokowi-Jusuf Kalla	Jokowi-Ma'ruf Amin
Koalisi	Demokrat, PBB, PKPI	Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI	PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PBB

Lawan Vonis Bebas Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Segera Kasasi



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis bebas kepada terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Dia terlibat kasus dugaan suap pengadaan perkara di Mahkamah Agung (MA)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis bebas Hakim Agung, Gazalba Saleh. Dia dinilai tidak terbukti menerima suap pengelolaan vonis kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan putusan itu, KPK segera melayangkan kasasi. "KPK secara prinsip menghargai setiap putusan majelis hakim. Namun demikian kami sangat yakin dengan alat bukti yang KPK miliki, sehingga kami akan segera lakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Selasa (1/8/2023).

Ali mengatakan lembaga antirasuah juga segera melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gazalba. "Penanganan perkara ini pada hakikatnya tidak semata penegakan hukum tindak pidana korupsi saja, namun juga sebagai upaya menjaga marwah institusi peradilan agar tidak terjadi praktik lancung korupsi, salah satunya melalui modus jual-beli perkara," kata Ali.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Arif Rahman membenarkan vonis bebas itu. "Betul, putusan majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan," katanya, usai persidangan, Selasa (1/8/2023).

Majelis perkara ini diketuai oleh Hakim Yoserizal dengan anggota Hakim T. Benny Eko Supriyadi dan Hakim Jeffry Yefta Sinaga. Pada sidang sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Hakim Agung Gazalba Saleh divonis 11 tahun penjara. Namun, kini Gazalba Saleh dinilai tak terbukti menerima suap.

Menurut jaksa KPK, hakim menilai dakwaan tidak terbukti. Sementara pihak jaksa meyakini bukti sudah cukup kuat untuk menyatakan Gazalba Saleh bersalah. "Pertimbangan majelis, intinya, tidak cukup bukti. Tapi kalau kita lihat dan kita yakin, bahwa alat bukti terutama saksi kemudian petunjuk itu menurut kami kuat untuk membuktikan dakwaan kami terhadap apa yang kita sangkakan kepada terdakwa," ucap dia.

Arif pun menyatakan pihaknya bakal segera mengajukan kasasi ke MA. Nantinya, dalam memori kasasi, akan dituangkan sejumlah hal untuk menyangkal vonis majelis hakim di PN Bandung. "Kita secepatnya menyatakan langsung kasasi," ujar dia.

Bukti Karut Marut Firli Cs

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, putusan ini menunjukkan bobroknya KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri yang tak berintegritas dan profesional.

Ia mengkritik kemampuan KPK untuk menemukan alat bukti yang layak dan patut, sehingga Hakim secara sah dan meyakinkan menyatakan tidak terjadi tindak pidana. Hal ini membuktikan KPK sama sekali tidak mumpuni.

"KPK gagal menemukan alat bukti yang layak dan patut, gagal jelaskan dalam proses persidangan, apakah unsur unsur itu terpenuhi, dan bagaimana kemudian proses tindak pidana itu terjadi," ujar Feri.

Lebih tegas, Feri mengatakan sangat patut bagi Firli dan kolega segera mundur dari jabatan pimpinan KPK. Menurutnya KPK saat ini terjerumus dalam jurang permasalahan yang kian rumit.

"Kalau dalam proses penuntutan ternyata gagal membuktikan sesuatu, tidak menemukan alat bukti yang cukup, artinya KPK tidak profesional bekerja, sembarangan menuntut orang, tidak betul -betul mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi," tegas Dosen Hukum Tata Negara itu.

"Pimpinan KPK mesti ber-tanggung jawab karena bagaimanapun secara ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK, pimpinan KPK adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam berbagai proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," imbuhnya.

Diketahui dalam dakwaan, Gazalba dinilai oleh jaksa terbukti menerima suap pengelolaan putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) senilai SGD 110 ribu atau setara dengan Rp 1,2 miliar.

Dalam pengembangannya, Kasus Gazalba Saleh ini juga terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dijerat sebagai tersangka bersama Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan sejumlah ASN di lingkungan MA.

Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimiyati serta sejumlah pegawai Mahkamah Agung menerima suap yang totalnya SGD 822.000 atau Rp 9.382.735.560 (kurs SGD 1 = Rp 11.416). Mereka diduga menerima suap terkait pengaturan vonis kasasi di MA.

Penerimaan suap tersebut terkait dengan dua pengelolaan perkara kasasi. Pertama, terhadap Gazalba Saleh dkk. Diduga Yosep dan Eko selaku pengacara memberikan SGD 310.000 terkait pengelolaan perkara kasasi pidana nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman. Suap diterima Gazalba melalui Desy Yustria, Nurmanto Akmal, dan Redhy Novarisa selaku PNS MA.

Kemudian ada uang SGD 100.000 yang diterima Gazalba melalui Prasetyo Nugroho selaku hakim yustisial atau panitera pengganti MA. Ia diduga menerima total Rp 1,2 miliar. Kedua, Hakim Agung Sudrajad Dimiyati diduga menerima suap dari Yosep dan Eko melalui Desy Yustria, Muhajir Habibie selaku PNS MA, dan Elly Tri Pangestuti selaku hakim yustisial atau panitera pengganti MA senilai SGD 200.000.

Suap itu agar membatalkan putusan perdamaian homologasi tahun 2015 antara Koperasi KSP Intidana dengan debitur dan memvonis koperasi tersebut pailit. Sebab KSP Intidana tidak menjalankan putusan soal homologasi. (wid,rls, ant,met/dya)

KEKAYAAN GAZALBA SALEH (LHKPN 21 JANUARI 2022)

TOTAL KEKAYAAN SENILAI
RP 7.882.108.961 ATAU RP 7,88 MILIAR.



TANAH DAN BANGUNAN
dengan total nilai Rp 5.200.000.000 atau Rp 5,2 miliar. Ada tiga properti yang dimiliki Gazalba Saleh.

Pertama, tanah seluas 286 m2 di Kab/Kota Bekasi senilai Rp 1 miliar.

Kedua, tanah dan bangunan seluas 120 m2/66 m2 di Kab/Kota Surabaya senilai Rp 2 miliar.

ketiga, tanah dan bangunan seluas 140 m2/56 m2 di Kab/Kota Bandung senilai Rp 2.200.000.000 atau Rp 2,2 miliar. Semua properti yang dimiliki Gazalba Saleh tercatat didapatkan dari hasil sendiri.



KENDARAAN
yang dimiliki hanya satu unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2015 seharga Rp 120 juta.



HARTA BERGERAK LAINNYA
senilai Rp 260.600.000



KAS-SETARA KAS
Rp 2.301.508.961 atau Rp 2,3 miliar.

HAKIM AGUNG GAZALBA SALEH DIVONIS BEBAS

ALASAN

Alat bukti tidak cukup kuat untuk menjerat Gazalba Saleh.

TUDUHAN

Menerima suap 20 ribu dolar Singapura dalam kasus pengelolaan perkara di lingkungan MA terkait permasalahan keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

PAPARAN TUNTUTAN

- KPK menilai Gazalba terlibat dalam pengelolaan perkara yang diminta oleh Heryanto Tanaka melalui pengacaranya Theodorius Yosep Parera.

- Untuk kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman terkait permasalahan keuangan di KSP Intidana.

TUNTUTAN JAKSA KPK

Hukuman 11 tahun penjara Subsidiar 6 bulan penjara dan diharuskan membayar denda Rp1 miliar.

